



PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN PROGRAM BEASISWA TAHUN 2026 DI BIRO KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Muhamad Firgy Alvino, Rizky Octa Putri Charin, Iryani

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Maritim Raja Ali Haji dan Biro Kesejahteraan Masyarakat Kepulauan Riau

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juni, 2026

Revised Juni, 2026

Accepted Juni, 2026

Available online Juni, 2026

mfalvino@student.umrah.ac.id

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

Pendidikan merupakan investasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia, namun akses terhadap pendidikan tinggi di Indonesia masih menghadapi kendala berupa keterbatasan ekonomi, ketimpangan wilayah, dan kondisi geografis. Sebagai upaya memperluas akses pendidikan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan Program Beasiswa Tahun 2026 melalui Biro Kesejahteraan Rakyat. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan prinsip *good governance* dalam pelaksanaan program tersebut serta mengidentifikasi faktor

pendukung dan penghambatnya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif melalui pengumpulan dan analisis data terkait pelaksanaan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip *good governance* telah diterapkan melalui transparansi informasi, akuntabilitas pengelolaan, partisipasi masyarakat, serta orientasi pada efektivitas dan keadilan program. Pada tahun 2026, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,06 miliar untuk 1.212 penerima beasiswa. Keterbukaan informasi mengenai persyaratan, kuota, dan hasil seleksi serta mekanisme verifikasi dokumen mendukung terwujudnya tata kelola yang baik. Meskipun demikian, kondisi geografis wilayah kepulauan, keterbatasan akses internet, dan tingginya jumlah pendaftar masih menjadi tantangan. Secara keseluruhan, program ini telah mencerminkan penerapan *good governance* yang mendukung pemerataan pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kepulauan Riau.

Kata kunci: *Good governance*, pendidikan, program beasiswa.

Pendahuluan

Pendidikan adalah salah satu pilar terpenting dalam proses pembangunan suatu bangsa. Jauh sebelum konsep modal manusia (*human capital*) ramai diperbincangkan, para pemikir ekonomi seperti Theodore W. Schultz telah menegaskan bahwa perolehan pengetahuan dan



keterampilan melalui pendidikan pada dasarnya adalah sebuah investasi, bukan sekadar konsumsi (Ardiana, 2022). Perspektif ini menempatkan pendidikan bukan hanya sebagai hak dasar warga negara, melainkan juga sebagai modal strategis jangka panjang yang mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat ketahanan sosial, dan mengakselerasi inovasi teknologi di suatu negara. Dalam kerangka itulah negara memiliki tanggung jawab moral sekaligus konstitusional untuk memastikan setiap warganya dapat mengakses pendidikan yang berkualitas (Zahwa et al., 2025).

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa akses terhadap pendidikan tinggi di Indonesia masih jauh dari merata. Data menunjukkan bahwa tamatan perguruan tinggi di Indonesia pada tahun 2025 penduduk Indonesia usia 15 tahun ke atas yang telah menamatkan pendidikan tinggi hanya sekitar 10,2-11 persen (BPS, 2025). Kesenjangan ini diperparah oleh berbagai hambatan yang saling berkelindan, mulai dari keterbatasan ekonomi keluarga, ketimpangan kualitas pendidikan antarwilayah, hingga faktor geografis yang menyulitkan akses bagi siswa di daerah terpencil. Siswa dari kelompok ekonomi lemah lebih banyak mengandalkan perguruan tinggi negeri yang disubsidi pemerintah, sementara perguruan tinggi swasta sulit dijangkau karena biaya yang lebih tinggi. Kondisi ini menandakan bahwa negara tidak bisa berdiam diri, maka intervensi kebijakan dalam bentuk bantuan pendidikan menjadi sebuah keniscayaan (Andina, 2025).

Di sinilah program beasiswa pemerintah memainkan peran yang sangat krusial. Beasiswa tidak sekadar memberikan bantuan finansial kepada penerimanya, melainkan juga merupakan instrumen kebijakan untuk mewujudkan pemerataan akses pendidikan sekaligus mencetak sumber daya manusia yang akan berkontribusi pada pembangunan daerah. Kebijakan semacam ini juga selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan kewajiban pemerintah dalam menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas layanan pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks pemerintahan daerah, program beasiswa yang dikelola oleh Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) menjadi salah satu wujud nyata dari tanggung jawab tersebut.

Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu daerah yang secara konsisten menjalankan program beasiswa sebagai bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusianya. Hal ini bukan tanpa alasan. Secara geografis, Kepulauan Riau terdiri dari gugusan



pulau yang tersebar luas, sehingga akses terhadap pendidikan tinggi menjadi tantangan tersendiri bagi banyak keluarga di wilayah ini. Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepulauan Riau yang terus meningkat mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam investasi SDM, di mana pada tahun 2025, Kepulauan Riau tercatat mengalami peningkatan status pembangunan manusia dari kategori tinggi menjadi sangat tinggi dengan nilai IPM 80,53. Capaian ini tentu tidak terlepas dari berbagai program peningkatan kualitas pendidikan yang dijalankan secara berkelanjutan, termasuk program beasiswa (KemenPANRB, 2025).

Pada tahun anggaran 2026, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Biro Kesejahteraan Rakyat kembali melanjutkan dan mengembangkan program beasiswanya. Program ini merupakan komitmen berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah Kepulauan Riau, dengan jumlah penerima yang diproyeksikan mencapai 1.212 orang, meningkat 2,1 persen dibandingkan tahun 2025 yang berjumlah 1.187 orang, dengan total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp3,06 miliar. Tahun ini pemerintah daerah memberikan perhatian khusus pada prinsip keadilan sosial, di mana penambahan kuota terbesar diarahkan kepada kelompok mahasiswa tidak mampu, termasuk lonjakan signifikan sebesar 66,7 persen pada kategori D III Tidak Mampu. Program ini membuka peluang bagi mahasiswa asal Kepulauan Riau yang menempuh pendidikan di dalam maupun luar daerah untuk mendapatkan dukungan finansial yang memadai (Arif, 2026; Pemprov Kepri, 2026).

Besarnya anggaran yang dikelola dan luasnya cakupan penerima manfaat menjadikan program beasiswa ini tidak dapat dikelola dengan cara yang sembarangan. Ia menuntut standar tata kelola yang baik agar tujuan mulianya benar-benar tercapai di lapangan. Inilah yang kemudian mempertemukan program beasiswa ini dengan konsep *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik. Akuntabilitas dan transparansi merupakan dua prinsip fundamental dalam tata kelola pemerintahan yang baik, dan dalam konteks hukum administrasi negara, kedua prinsip ini memainkan peran krusial dalam menjamin bahwa kebijakan dan tindakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa penerapan prinsip-prinsip ini, program yang secara niat baik pun dapat menyimpang dari sasaran .

Faktanya, tidak sedikit program bantuan pemerintah yang menghadapi masalah dalam pelaksanaannya. Pada tahun 2021, jumlah laporan masyarakat yang disampaikan kepada Ombudsman RI mencapai 7.186 laporan, dan instansi yang paling banyak dilaporkan adalah



pemerintah daerah sebesar 40,99 persen, dengan dasar pengaduan berupa kualitas pelayanan publik yang kurang baik, prosedur yang berbelit-belit, dan belum terwujudnya transparansi. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan *good governance* dalam pelayanan publik di daerah masih menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas. Dalam konteks pengelolaan program beasiswa, lemahnya transparansi informasi, tidak jelasnya mekanisme seleksi, serta kurangnya akuntabilitas dalam penyaluran dana dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik dan bahkan membuka ruang bagi penyalahgunaan wewenang (Titania & Nursadi Harsanto, 2023).

Dengan adanya akses informasi yang lebih terbuka, publik dapat mengawasi jalannya pemerintahan dan ikut berpartisipasi secara langsung dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini menegaskan bahwa transparansi bukan sekadar nilai ideal, melainkan mekanisme nyata yang memperkuat legitimasi pemerintah di hadapan masyarakat. Dalam pengelolaan program beasiswa, keterbukaan informasi tentang persyaratan, mekanisme seleksi, jumlah penerima, dan penggunaan anggaran merupakan bagian tak terpisahkan dari tanggung jawab penyelenggara program. Maka, mengkaji bagaimana prinsip-prinsip *good governance* diterapkan dalam pelaksanaan Program Beasiswa Tahun 2026 di Biro Kesra Provinsi Kepulauan Riau menjadi sesuatu yang relevan dan mendesak untuk dilakukan. (Utomo & Nawangsari, 2025)

Penelitian ini memiliki dua tujuan pokok. Pertama, menganalisis bagaimana prinsip-prinsip *good governance* diterapkan dalam pelaksanaan Program Beasiswa Tahun 2026 di Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kepulauan Riau. Kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam program tersebut sehingga dapat menjadi bahan evaluasi bagi perbaikan tata kelola program di masa mendatang.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena objek kajian dalam penelitian ini berupa fenomena sosial yang berlangsung secara nyata di lapangan, yaitu penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pelaksanaan Program Beasiswa Tahun 2026 di Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kepulauan



Riau. Fenomena semacam ini tidak cukup dijelaskan melalui angka-angka dan pengujian statistik, melainkan memerlukan pemahaman mendalam terhadap proses, konteks, makna, serta dinamika yang terjadi di baliknya. Metode penelitian kualitatif berlandaskan pada filsafat postpositivisme dan digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti bertindak sebagai instrumen kunci dan hasil penelitiannya lebih menekankan makna daripada generalisasi (Safarudin et al., 2023).

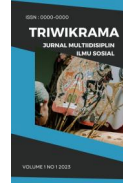
Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan Program Beasiswa Tahun 2026 di Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui perluasan akses pendidikan tinggi. Pada tahun 2026 pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,06 miliar untuk 1.212 penerima beasiswa, meningkat 2,1 persen dibandingkan tahun 2025. Penambahan kuota terutama difokuskan pada mahasiswa tidak mampu sebagai upaya memperkuat keadilan sosial dalam pendidikan (Pemprov Kepri, 2026).

Besarnya jumlah penerima dan dana yang dikelola menuntut penerapan tata kelola yang baik agar bantuan tepat sasaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip good governance diterapkan melalui transparansi informasi, akuntabilitas proses seleksi, partisipasi masyarakat, serta orientasi pada efektivitas dan keadilan program.

1. Transparansi

Transparansi terlihat dari keterbukaan informasi mengenai jadwal pendaftaran, persyaratan, kategori beasiswa, kuota, hingga hasil seleksi yang dapat diakses melalui sistem informasi beasiswa dan portal resmi pemerintah daerah. Keterbukaan ini membantu meningkatkan kepercayaan publik dan mengurangi potensi penyimpangan dalam proses seleksi (Kaila Utomo & Tita Nawangsari, 2025). Namun, tantangan masih muncul karena kondisi geografis Kepulauan Riau yang terdiri atas banyak pulau sehingga penyebaran informasi belum sepenuhnya merata.



2. Akuntabilitas

Akuntabilitas program tercermin dari adanya persyaratan administrasi yang jelas, verifikasi dokumen, mekanisme seleksi yang terstruktur, dan publikasi hasil penerima beasiswa. Setiap tahapan pelaksanaan dapat ditelusuri sehingga keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Penerapan akuntabilitas ini penting karena program beasiswa menggunakan dana publik yang harus disalurkan secara tepat sasaran (Jabar et al., 2024).

3. Partisipasi

Partisipasi mahasiswa terlihat melalui keterlibatan dalam proses pendaftaran dan komunikasi dengan penyelenggara program. Tingginya minat mahasiswa terhadap beasiswa menunjukkan bahwa program ini dianggap relevan dengan kebutuhan masyarakat. Meski demikian, perbedaan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi digital masih menjadi kendala sehingga sosialisasi dan pendampingan tetap diperlukan.

4. Efektivitas dan Keadilan Program

Efektivitas dan keadilan program tercermin dari peningkatan kuota bagi mahasiswa tidak mampu, termasuk kenaikan signifikan pada kategori D III tidak mampu. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya mempertimbangkan prestasi akademik, tetapi juga kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dengan demikian, program beasiswa berfungsi sebagai instrumen pemerataan pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia daerah (Kepulauan Riau, 2026).

5. Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor pendukung penerapan good governance meliputi komitmen pemerintah daerah, penggunaan sistem pendaftaran berbasis daring, dan keterbukaan informasi kepada publik. Sementara itu, faktor penghambat antara lain kondisi geografis wilayah kepulauan, keterbatasan akses internet di beberapa daerah, serta meningkatnya jumlah pendaftar yang tidak sebanding dengan kuota yang tersedia.



Secara keseluruhan, pelaksanaan Program Beasiswa Tahun 2026 di Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kepulauan Riau telah mencerminkan penerapan prinsip good governance yang cukup baik. Transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan orientasi pada keadilan sosial menjadi indikator utama dalam penyelenggaraan program, meskipun masih diperlukan perbaikan pada aspek pemerataan akses informasi dan pelayanan di wilayah kepulauan.

Kesimpulan

Secara umum, pelaksanaan Program Beasiswa Tahun 2026 di Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan bahwa prinsip good governance telah menjadi landasan penting dalam pengelolaan bantuan pendidikan daerah. Program ini tidak hanya berorientasi pada pemberian bantuan finansial kepada mahasiswa, tetapi juga diarahkan untuk memperluas akses pendidikan tinggi dan mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kepulauan Riau. Komitmen tersebut tercermin dari peningkatan jumlah penerima beasiswa menjadi 1.212 orang dengan alokasi anggaran sebesar Rp3,06 miliar pada tahun 2026.

Lebih lanjut, penerapan prinsip good governance terlihat melalui adanya transparansi informasi, akuntabilitas dalam proses seleksi, partisipasi masyarakat, serta orientasi pada efektivitas dan keadilan program. Keterbukaan informasi mengenai persyaratan, jadwal pendaftaran, kuota, dan hasil seleksi telah memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh informasi secara lebih mudah. Di sisi lain, proses verifikasi dokumen dan mekanisme seleksi yang terstruktur menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam memastikan bahwa penggunaan dana publik dapat dipertanggungjawabkan secara jelas dan tepat sasaran.

Secara lebih khusus, keberpihakan program terhadap mahasiswa tidak mampu menjadi indikator penting dalam mewujudkan keadilan sosial. Peningkatan kuota pada kategori mahasiswa kurang mampu menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya mempertimbangkan aspek prestasi akademik, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial ekonomi penerima manfaat. Dengan demikian, program beasiswa berfungsi sebagai instrumen pemerataan kesempatan pendidikan sekaligus investasi jangka panjang bagi pembangunan daerah.



Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang perlu menjadi perhatian pada masa mendatang. Kondisi geografis Kepulauan Riau yang terdiri atas wilayah kepulauan, keterbatasan akses internet di beberapa daerah, serta tingginya jumlah pendaftar dibandingkan kuota yang tersedia masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan program. Oleh karena itu, upaya peningkatan pemerataan akses informasi, penguatan sosialisasi, dan pengembangan layanan digital yang lebih inklusif perlu terus dilakukan agar penerapan good governance dalam program beasiswa dapat berjalan semakin optimal dan menjangkau seluruh masyarakat secara lebih merata.



DAFTAR PUSTAKA

- Amarullah, et al. (2023). Meningkatkan daya saing bangsa: Peran strategis investasi pendidikan dalam pengembangan SDM. *ResearchGate*.
<https://www.researchgate.net/publication/391944778>
- Ardiana. (2022). Pendidikan sebagai investasi dalam pembangunan fondasi peradaban bangsa. Dalam Amarullah et al. (2023), *Meningkatkan daya saing bangsa: Peran strategis investasi pendidikan dalam pengembangan SDM*.
- Badan Pusat Statistik. (2025, Maret 30). *Tingkat pendidikan masyarakat Indonesia 2024*. GoodStats. <https://goodstats.id/infographic/tingkat-pendidikan-masyarakat-indonesia-2024-BFsMy>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau. (2024). *Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kepulauan Riau 2023*. BPS Kepri. <https://kepri.bps.go.id/id/publication/2024/05/13/5b350be499359be305ccaef6>
- Diskominfo Provinsi Kepulauan Riau. (2026, 6 April). *Pemprov Kepri tingkatkan kuota beasiswa 2026: Fokus pada keadilan sosial dan mahasiswa tidak mampu*. Portal Provinsi Kepulauan Riau. <https://www.kepriprov.go.id/berita/gubernur/pemprov-kepri-tingkatkan-kuota-beasiswa-2026>
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2025, 6 November). *IPM Indonesia 2025 naik jadi 75,90: Harapan hidup dan pendidikan terus meningkat*. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/ipm-indonesia-2025-naik-jadi-75-90-harapan-hidup-dan-pendidikan-terus-meningkat>
- Ombudsman Republik Indonesia. (2022). *Laporan tahunan Ombudsman RI 2021*. Ombudsman RI.
- Perpustakaan DPR RI. (2025, Februari). *Partisipasi pendidikan tinggi di Indonesia masih menghadapi tantangan besar*. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XVII-4-II-P3DI-Februari-2025-232.pdf
- RRI. (2026, 7 April). *Pemprov Kepri tingkatkan kuota beasiswa mahasiswa tahun 2026*. RRI.co.id. <https://rri.co.id/batam/berita-lain/2315183/about.html>
- Syabran Jabar, Aldri Frinaldi, & Roberia. (2024). Akuntabilitas dan transparansi dalam perspektif hukum administrasi negara. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(12), 720–728. <https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i12.1196>

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial

Volume 12, Number 1, 2026

E-ISSN: 2988-1986

Open Access:



Wijaya & Saleh. (2025). Transparansi dan akuntabilitas sektor publik: Pilar utama *good governance*. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 8(2), 103–109.